

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH, PERAN INTERNAL AUDIT DAN
PENERAPAN SAP TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**

(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :
Ngisti Sofiyatul Amani
NIM. 14.0102.0085

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH, PERAN INTERNAL AUDIT, DAN
PENERAPAN SAP TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**

**(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun Oleh:

**Ngisti Sofiyatul Amani
14.0102.0085**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PERAN INTERNAL AUDIT DAN PENERAPAN SAP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

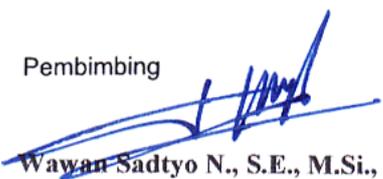
Ngisti Sofiyatul Amani

NPM 14.0102.0085

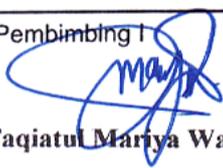
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **15 Agustus 2018**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

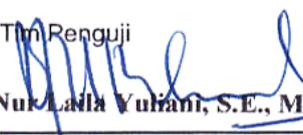

Wawan Sadtyo N., S.E., M.Si., Ak., CA.

Pembimbing I


Faqiatul Mariya Waharini, S.E., M.Si.

Pembimbing II

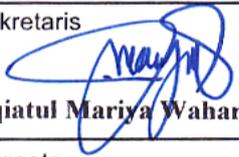
Tim Penguji


Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc.

Ketua


Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si.

Sekretaris


Faqiatul Mariya Waharini, S.E., M.Si.

Anggota

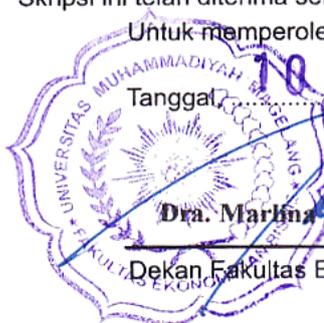
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal

10 SEP 2018

Dra. Marlina Kurnia, MM

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ngisti Sofiyatul Amani

NIM : 14.0102.0085

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PERAN INTERNAL
AUDIT, DAN PENERAPAN SAP TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjananya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 15 Agustus 2018

Pembuat Pernyataan,



Ngisti Sofiyatul Amani
NIM. 14.0102.0085

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ngisti Sofiyatul Amani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 03 Oktober 1995
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Losari, Gentingsari, Bansari, Temanggung
Alamat Email : ngistisofiya95@gmail.com

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar (2002-2008) : SD Negeri Gentingsari
SMP (2008-2011) : SMP Negeri 1 Bansari
SMK (2011-2014) : SMA Negeri 1 Candiroto
Perguruan Tinggi (2014-2018) : S1 Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, 06 September 2018
Peneliti,

Ngisti Sofiyatul Amani
NIM. 14.0102.0085

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari semua urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S Al-Insyirah:6-8)

“Kesuksesan bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tetapi seberapa besar kamu bisa membawa perubahan untuk hidup orang lain”

(Michelle Obama)

“Kesuksesanmu tak bisa dibandingkan dengan orang lain, melainkan dibandingkan dengan dirimu sendiri”

(Jaya Setiabudi)

“Agar sukses, kemauanmu untuk berhasil harus lebih besar dari ketakutanmu akan kegagalan”

(Bill Cosby)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PERAN INTERNAL AUDIT, DAN PENERAPAN SAP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung)”**.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Wawan Sadtyo Nugroho, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Faqiatul Mariya Waharini, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laoran skripsi ini.
2. Ibu Nur Laila Yuliani, SE M.Sc, Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, SE M.Sc, Ak selaku dosen penguji 1 yang sudah banyak membantu kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
4. Ibu Veni Soraya Dewi S.E., Msi selaku dosen penguji 2 yang juga banyak membantu memberikan masukan di dalam perbaikan skripsi.

Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan kepada penyusun. Harapan dari penyusun, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan`	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Halaman Riwayat Hidup	iv
Motto	v
Kata Pengantar	vi
Daftar isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
Abstrak	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	8
1. Secara Empiris	8
2. Secara Praktis	8
E. Sistematika Pembahasan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori	10
1. <i>Agency Theory</i>	10
2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	12
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia	13
4. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	14
5. Peran Internal Audit.....	15
6. Standar Akuntansi Pemerintah	16

B. Telaah Penelitian Sebelumnya	18
C. Perumusan Hipotesis.....	19
1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	19
2. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	21
2. Pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	22
2. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	23
D. Model Penelitian	25

BAB III METODA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	26
1. Jenis dan Sumber Data	26
2. Teknik Pengumpulan Data	26
B. Populasi dan Sampel	26
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	27
1. Variabel Dependen	27
2. Variabel Independen.....	28
D. Metoda Analisis Data.....	31
1. Statistik Deskriptif.....	31
2. Uji Kualitas Data	31
3. Analisis Regresi Berganda.....	33
4. Pengujian Hipotesis	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sampel Penelitian	37
B. Statistik Deskriptif	37
1. Statistik Deskriptif Responden	37

2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	39
C. Uji Kualitas Data.....	41
1. Uji Validitas.....	41
2. Uji Reliabilitas	43
D. Analisis Regresi Berganda.....	44
E. Uji Hipotesis.....	46
1. Uji Koefisien Determinasi.....	46
2. Uji F.....	46
3. Uji t.....	47
E. Pembahasan.....	50
1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	50
2. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	51
3. Pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	52
4. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	53
 BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	56
B. Keterbatasan Penelitian.....	57
C. Saran.....	57
 DAFTAR PUSTAKA	58
 LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Opini LKPD	2
Tabel 1.2	Opini LKPD Kabupaten Temanggung.....	3
Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya	18
Tabel 4.1	Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian.....	37
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif Responden.....	38
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	39
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas.....	42
Tabel 4.5	Hasil Cross Loading.....	42
Tabel 4.6	Hasil Uji Reliabilitas	44
Tabel 4.7	Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	44
Tabel 4.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi	46
Tabel 4.9	Hasil Uji F	46
Tabel 4.9	Hasil Uji t	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2	Model Penelitian	25
Gambar 3.1	Penerimaan Hipotesis Uji F.....	35
Gambar 3.2	Penerimaan Hipotesis Uji t.....	36
Gambar 4.1	Hasil Uji F	47
Gambar 4.2	Nilai Kritis Uji t Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia	48
Gambar 4.3	Nilai Kritis Uji t Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	49
Gambar 4.4	Nilai Kritis Uji t Variabel Peran Internal Audit	49
Gambar 4.5	Nilai Kritis Uji t Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Nama OPD	62
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.....	64
Lampiran 3 Tabulasi Data.....	
3.1 Tabulasi Data Sebelum Validitas	71
3.2 Tabulasi Data Setelah Validitas	93
Lampiran 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif	115
Lampiran 5 Hasil Uji Validitas	116
Lampiran 6 Hasil <i>Cross Loading</i>	119
Lampiran 7 Hasil Hasil Uji Reliabilitas	121
Lampiran 7 Hasil Uji Hipotesis	122
Lampiran 8 Surat Ijin Riset.....	123
Lampiran 9 Tanda Terima Kuesioner	126

ABSTRAK

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PERAN INTERNAL
AUDIT, DAN PENERAPAN SAP TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung)**

**Oleh:
Ngisti Sofiyatul Amani**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan, peran internal audit, dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sampel penelitian ini adalah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Uji hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda, Uji F dan uji T. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa, kompetensi sumber daya manusia dan peran internal audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: Kompetensi SDM, penerapan SAKD, peran internal audit, penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan yang dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan didalam laporan keuangan dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Laporan keuangan juga dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan instansi sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang handal dan dapat dipercaya. Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Kurangnya kualitas laporan keuangan sering menjadi permasalahan dalam suatu instansi termasuk pada pemerintah daerah di Indonesia yaitu pada Organisasi Perangkat Daerah masing-masing daerah di Indonesia. Meningkatnya kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah maka akan lebih mudah dalam menentukan keputusan yang dapat membawa pemerintah ke arah yang lebih baik dan memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan yaitu Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya mendapat penilaian berupa

Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Saat ini, perkembangan kualitas laporan keuangan LKPD yang diberikan BPK RI ternyata banyak yang memperoleh opini WTP dan masih ada juga yang mendapatkan opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Berikut perkembangan opini LKPD tahun 2012-2016:

Tabel 1.1
Perkembangan Opini LKPD 2012-2016

Tahun	OPINI								
	WTP	%	WDP	%	TMP	%	TW	%	Q
2012	120	23%	320	61%	79	15%	5	1%	524
2013	157	30%	309	59%	47	9%	11	12%	524
2014	253	47%	248	46%	33	6%	5	1%	539
2015	312	58%	187	35%	30	6%	4	1%	533
2016	375	70%	139	26%	23	4%	0	0	537

Sumber : IHPS BPK RI Semester 1 Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 bahwa perkembangan opini LKPD tahun 2012-2016 mengalami perbaikan. Terdapat 537 LKPD Tahun 2016, BPK memberikan 375 opini WTP (70%), 139 opini WDP (26%), dan 23 opini TMP (4%). WTP dicapai oleh 31 dari 34 pemerintah provinsi (91%), 272 dari 415 pemerintah kabupaten (66%) dan 72 dari 93 pemerintah kota (77%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah atas

program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% ditahun 2019. Kenaikan opini WTP ini menunjukkan adanya kenaikan kualitas LKPD. Contohnya Kabupaten Temanggung, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang ditulis pada tanggal 11 Juli 2017 menyampaikan bahwa Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang mendapatkan hasil opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk kelima kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2012 hingga 2017 dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK). (www.bpk.go.id). Berikut adalah hasil opini BPK terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2012-2017:

Tabel 1.2
Opini LKPD tahun 2012-2017

Kab.	Tahun					
Temanggung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

(Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2017 (www.bpk.go.id))

Berdasarkan fakta yang dapat diketahui dari Tabel 1.2 BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kabupaten Temanggung selama enam tahun berturut-turut. Opini tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya penurunan kualitas pelaporan keuangan. Tidak adanya penurunan kualitas pelaporan dengan hasil WTP belum bisa dijadikan dasar untuk memastikan bahwa laporan keuangan di Kabupaten Temanggung benar-benar berkualitas. Pemerintah sangat memerlukan laporan keuangan yang benar-benar berkualitas supaya menghasilkan informasi yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan faktor-faktor pendukung

yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Maka, perlu dilakukan suatu penelitian yang menganalisis faktor tersebut untuk menentukan seberapa besar tingkat pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dalam rangka menciptakan *good governance* juga harus diikuti dengan sumber daya manusia yang kompeten. Dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan akan menyajikan informasi laporan keuangan yang berkualitas, dimana kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Suparno, 2005:24). Penelitian mengenai sumber daya manusia penuh dilakukan oleh Putra et al., (2017) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, namun penelitian yang dilakukan Yenny (2013) menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah selain membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten juga perlu adanya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) Nomor 2 Tahun 1980 menjelaskan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah maka akan menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu

untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Penelitian mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pernah dilakukan oleh Putra et al., (2017) yang menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan, namun penelitian yang dilakukan oleh Ihsanti (2014) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kuangan negara wajib dikelola oleh aparatur negara yang kompeten secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, transparan, dan bertanggungjawab. Suatu instansi juga membutuhkan peran internal audit untuk mencapai tujuan organisasi. Peran internal audit dapat digunakan untuk menguji dan menilai efektivitas dan kecukupan sistem pengendalian internal pemerintah, salah satunya dengan menguji dan mengoreksi laporan keuangan suatu lembaga pemerintah daerah (Hery, 2010:33). Penelitian mengenai peran internal audit yang pernah dilakukan oleh Putra et al., (2017) yang menyatakan bahwa peran internal audit berpengaruh positif terhadap laporan keuangan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Pramudityo (2017) yang

menyatakan adanya pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Putra et al., (2017) yang meneliti tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan peran internal audit terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten Bangli. Hasil dari penelitian tersebut yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Perbedaan penelitian ini terkait dua hal yaitu **pertama**, menambah variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), karena merupakan pedoman yang dibutuhkan untuk membantu kelancaran kerja pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengatur penyajian laporan keuangan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas (Zeyn, 2011) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mewajibkan pemerintah daerah untuk melaporkan hasil secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) akan dapat disusun laporan keuangan yang berkualitas. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat digunakan untuk meminimalisir masalah ketidakseimbangan informasi dalam pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

Agus et al., (2017) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kedua, penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung karena laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Opini tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya penurunan kualitas pelaporan keuangan. Tidak adanya penurunan kualitas pelaporan dengan hasil WTP belum bisa dijadikan dasar untuk memastikan bahwa laporan keuangan di Kabupaten Temanggung benar-benar berkualitas. Pemerintah sangat memerlukan laporan keuangan yang benar-benar berkualitas supaya menghasilkan informasi yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Maka, perlu dilakukan suatu penelitian yang menganalisis faktor tersebut untuk menentukan seberapa besar tingkat pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah peran internal audit berpengaruh terhadap laporan keuangan?

4. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh peran internal audit berpengaruh terhadap laporan keuangan.
4. Untuk menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap laporan keuangan.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori, pengetahuan pada bidang akuntansi sektor publik, dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan pengetahuan, serta dapat dijadikan bahan masukan dan informasi tambahan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKAN DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-okok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian terdahulu, hipotesis, dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisa data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas, dan uji reliabilitas data, analisis regresi, dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. *Agency Theory*

Jensen (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu: (a) terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*), dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik; dan (b) terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh principal maupun agent Jensen (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent*

akan bertindak untuk kepentingan principal. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*.

Aplikasi *agency theory* dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, *return* maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif/imbalan khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen. Inti dari *agency theory* atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan.

Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) asumsi yaitu :

a) Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*)

b) Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information* (AI) antara prinsipal dan agen.

c) Asumsi tentang informasi.

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode.

Suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan,

andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan, dan kesalahan material, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Winindyaningrum, 2009).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan

(*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan . Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

4. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Halim (2008) definisi akuntansi pemerintah daerah yang disebutnya sebagai Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.

Berbeda dengan Halim (2008), menurut Nordiawan (2006) akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi– transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, asset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumen–dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara.

5. Peran Internal Audit

The Institute of Internal Auditor (1999) menyatakan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Internal audit membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah daerah yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Inspektorat dipimpin oleh inspektur dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 2 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menyatakan bahwa inspektorat melakukan pengawasan atas pengawasan pemerintahan daerah meliputi: melakukan pengawasan administrasi pemerintahan, pengawasan administrasi pemerintahan dilakukan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah dan melakukan pengawasan urusan pemerintahan.

Pengawasan urusan daerah dilakukan terhadap urusan wajib, urusan pilihan, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kebijakan pinjaman hibah luar negeri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

6. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Sampai dengan tahun anggaran 2013, pemerintah daerah masih menerapkan standar akuntansi

pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Perbedaan fundamental Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terletak pada basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Standar akuntansi pemerintahan menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan (Zeyn, 2011).

Penerapan standar akuntansi pemerintahan mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan akan dapat disusun laporan keuangan yang *useful*. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yenny (2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia, 2. Komitmen Pimpinan, 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi, 4. Sistem Pengendalian Intern, 5. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 	<p>Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Pimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan</p>
2	Andini & Yusrawati (2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia, 2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 4. Kualitas Laporan Keuangan Daerah 	<p>Bahwa kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang</p>
3.	Kiranayanti, & Erawati (2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia, 2. Sistem Pengendalian Intern, 3. Pemahaman Basis AkruaL, 4. Kualitas Laporan Keuangan 	<p>Kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</p>
4.	Putra et al., (2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas Sumber Daya Manusia, 2. Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, 3. Peran Internal Audit, 4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 	<p>Secara parsial kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan</p>
5.	Agus et al., (2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia, 2. Pemahaman Akuntansi, 3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern, 4. Pemanfaatan Sistem 	<p>Kompetensi sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, penerapan sistem pengendalian intern, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan standar akuntansi</p>

**Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)**

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Akuntansi Keuangan Daerah,	pemerintahan , pemanfaatan teknologi informasi
		5. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
		6. Pemanfaatan Teknologi Informasi	
		Kualitas Laporan Keuangan	
6.	Kesuma (2017)	1. <i>Good Governance</i> , 2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, 3. Sistem Pengendalian Internal 4. Kompetensi Aparatur Pemerintah, 5. Kualitas Laporan keuangan	<i>Good governance</i> , penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan kompetensi aparatur pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
7.	Rini (2017)	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia, 2. Pengendalian Internal, 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi, 4. Peran Inspektorat Daerah 5. Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran Inspektorat Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Sumber : data dari berbagai penelitian, 2018

C. Perumusan Hipotesis

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Winindyaningrum (2009) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai

tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Kompetensi sumber daya manusia dalam teori keagenan merupakan pelaksana dalam melaksanakan amanat dari rakyat (*principal*) untuk pengelolaan keuangan daerah. Sumber daya manusia akan bertindak dengan kompetensinya yang sesuai dengan kepentingan rakyat (*principal*), karena kompetensi sumber daya manusia penting untuk membantu kelancaran kegiatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.

Tjiptoherijanto (2001) menyatakan bahwa dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Penelitian Putra et al., (2017) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kompetensi yang tinggi yang dimiliki sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan maka akan menentukan kualitas sumber daya

manusia yang akhirnya akan menentukan kualitas laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dalam teori keagenan menyatakan bahwa dengan adanya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam pemerintah daerah akan membantu untuk memaksimalkan peran pemerintah dalam menjalankan amanat dari rakyat (*principal*), maka diyakini Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) akan menunjang kelancaran Pemerintah Daerah (*agent*) dalam menjalankan tugasnya supaya sesuai dengan tujuan rakyat (*principal*).

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dalam pengelolaan keuangan daerah akan membantu pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat digunakan pihak eksternal dan internal pemerintah daerah untuk mengambil keputusan. Sistem akuntansi adalah suatu kesatuan yang apabila tidak

diterapkannya atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka akan sulit memperoleh karakteristik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu relevan, andal dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Rasdianto, 2013).

Penelitian Putra et al., (2017) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dalam suatu perusahaan maka akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Peran Internal Audit berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

The Institute of Internal Auditor (1999) menyatakan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Peran internal audit dalam teori keagenan merupakan salah satu mekanisme monitoring yang mampu mengatasi permasalahan *asimetri informasi*. Internal audit mempunyai peran penting dalam memonitor dan mengurangi risiko informasi. Internal audit dapat membantu pemerintah daerah melakukan audit LKPD supaya terhindar dari kesalahan dan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Internal audit membantu pemerintah daerah mencapai tujuannya dengan

pendekatan sistematis dan ketat agar mealakukan evaluasi dan meningkatkan efektivitas terhadap risiko (Randal J.Elder et al., 2011:450).

Penelitian Putra et al., (2017) menunjukkan bahwa peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif peran internal audit maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkannya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3. Peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

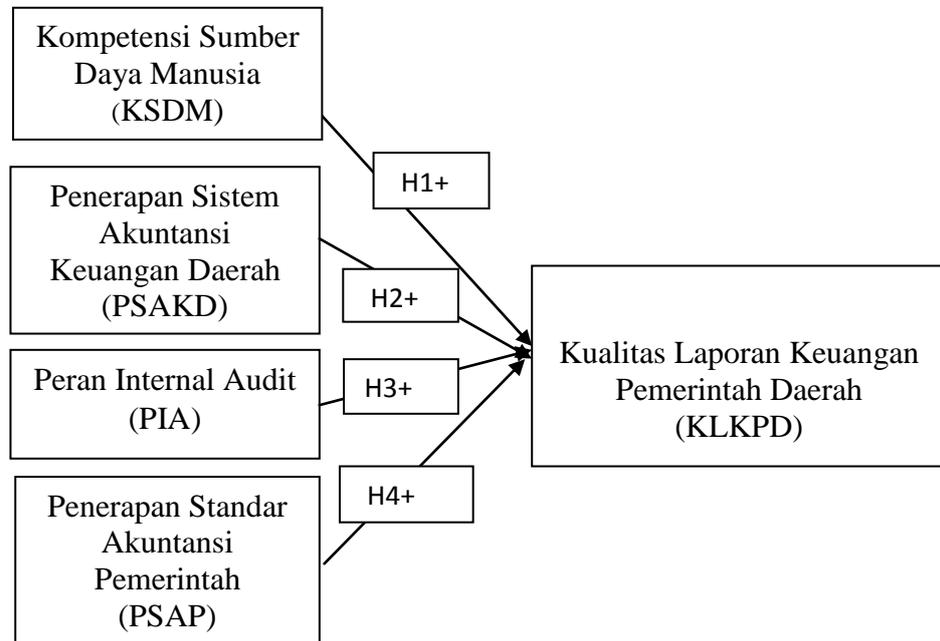
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berisi mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam teori keagenan dapat membantu pemerintah daerah untuk memaksimalkan peran pemerintah dalam menjalankan amanat dari rakyat (*principal*). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijadikan sebagai pedoman yang dibutuhkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan supaya sesuai dengan tujuan rakyat (*principal*) dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam pengelolaan keuangan maka dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjamin bahwa laporan keuangan disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunannya. Informasi yang berguna merupakan indikator bahwa laporan keuangan memenuhi kualifikasi informasi. Standar akuntansi pemerintah juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel (Wijaya, 2008:4).

Penelitian Agus et al., (2017) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan ketika dalam penyusunan laporan keuangan sesuai prinsip-prinsip standar akuntansi pemerintah maka akan terciptanya laporan keuangan yang transparan, akuntabilitas dan akan meningkatkan kualitas LKPD. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H4. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan Sugiyono (2012). Jenis data penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik survei, yaitu dengan memberikan kuesioner yang langsung disebarikan kepada responden yang sudah ditentukan kriterianya di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kuesioner dibuat dalam bentuk pernyataan secara berstruktur yang mana responden dibatasi dalam memberikan jawaban pada alternatif jawaban tertentu saja.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2012). Populasi yang akan digunakan dalam penelitian adalah Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Temanggung. Pengambilan sampel

atau responden dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria-kriteria tersebut antara lain:

1. Pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan di masing-masing instansi pada Organisasi Perangkat Daerah (Kasubag perencanaan dan keuangan, bendahara, staf akuntansi)
2. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

1. Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah kesesuaian berdasarkan standar suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama suatu periode. Variabel kualitas laporan keuangan diukur dengan 8 indikator yang mengacu pada penelitian Nurillah dan Dul (2014) dimana indikatornya sebagai berikut:

- a) Manfaat dari laporan keuangan yang dihasilkan
- b) Ketepatan pelaporan laporan keuangan
- c) Kelengkapan informasi yang disajikan
- d) Penyajian secara jujur

- e) Kejelasan penyajian informasi dalam laporan keuangan
- f) Isi laporan keuangan dapat diverifikasi
- g) Keakuratan informasi yang disajikan
- h) Isi laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya

Kemudian diukur menggunakan skala likert 5 (sangat setuju), 4 (setuju), 3 (netral), 2 (tidak setuju), 1 (sangat tidak setuju).

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Tjiptoherjanto (2001) menyatakan bahwa untuk menilai kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan 7 indikator yang mengacu pada penelitian Nurillah dan Dul (2014) dimana indikatornya sebagai berikut:

- a) Pendidikan
- b) Kemampuan
- c) Sumber daya yang memadai
- d) Tanggungjawab
- e) Pelatihan
- f) Pengalaman

Kemudian diukur menggunakan skala likert 5 (sangat setuju), 4 (setuju), 3 (netral), 2 (tidak setuju), 1 (sangat tidak setuju).

3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Nordiawan (2006) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan secara sederhana adalah suatu sistem informasi yang menggabungkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Variabel sistem akuntansi keuangan daerah diukur dengan 8 indikator yang mengacu pada penelitian Nurillah dan Dul (2014) dimana indikatornya sebagai berikut:

- a) Kesesuaian sistem dengan standar akuntansi pemerintah
- b) Pengidentifikasian transaksi
- c) Pencatatan transaksi
- d) Bukti disetiap transaksi
- e) Pencatatan kronologis
- f) Pengklasifikasian transaksi
- g) Laporan keuangan setiap periode
- h) Pelaporan yang konsisten dan periodik.

Kemudian diukur menggunakan skala likert 5 (sangat setuju), 4 (setuju), 3 (netral), 2 (tidak setuju), 1 (sangat tidak setuju).

4. Peran Internal Audit

The Institute of Internal Auditor (1999) menyatakan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi

yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal audit membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas³ proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi. Variabel peran internal audit diukur dengan 7 indikator yang mengacu pada penelitian Adelia (2015) dimana indikatornya sebagai berikut:

- a) Bebas dari intervensi
- b) Objektif dalam menjalankan peran
- c) Menggunakan kompetensi dalam menjalankan tugas
- d) Memiliki keahlian profesi
- e) Mengevaluasi kegiatan audit internal
- f) Mengkomunikasikan hasil temuan
- g) Pemantauan tindak lanjut sesuai prosedur

Kemudian diukur menggunakan skala likert 5 (sangat setuju), 4 (setuju), 3 (netral), 2 (tidak setuju), 1 (sangat tidak setuju).

5. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna

laporan. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintah diukur dengan 7 indikator yang mengacu pada penelitian Evicahyani (2013) dimana indikatornya sebagai berikut:

- a) Akuntabilitas
- b) Manajemen
- c) Transparasi
- d) Keseimbangan antar generasi
- e) Manfaat penerapan standar
- f) Peningkatan produktivitas dan penyajian
- g) Evaluasi kinerja

Kemudian diukur menggunakan skala likert 5 (sangat setuju), 4 (setuju), 3 (netral), 2 (tidak setuju), 1 (sangat tidak setuju).

D. Metoda Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, *maksimum*, *minimum*, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* distribusi Ghozali (2016).

2. Uji Kualitas Data

a) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut Ghozali (2016). Menguji validitas

instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). *Confirmatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai undimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah variabel. Dengan analisis faktor konfirmatori dapat menguji apakah indikator benar-benar merupakan indikator dari variabel tersebut.

Analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan masing-masing indikator kedalam beberapa faktor apabila indikator yang digunakan merupakan indikator konstruk. Ketika pada pengelompokkan terdapat kesulitan dalam menginterpretasikan maka perlu dilakukan rotasi. Alat penting untuk interpretasi faktor adalah *factor rotation*. Rotasi ortogonal melakukan rotasi dengan sudut 90 derajat, sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut *oblique rotation*. Rotasi ortogonal dapat berbentuk *quartimax*, *varimax*, *equimax* dan *promax* Ghozali (2016)

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Bartlett of Sphericity* merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan *Barlett test* semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antara variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat *interkorelasi* antar variabel dan

dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ dan *cross loading* $> 0,50$ untuk dapat melakukan analisis faktor Ghozali, (2016:57).

b) Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, maka peneliti menggunakan koefisien *cronbach alpha* (α) lebih besar dari 0,70 atau 70% (Ghozali, 2016:47-48).

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Tujuan analisis regresi yaitu mengukur hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen Ghozali (2016). Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda yang diformulasikan sebagai berikut:

$$KLK = \alpha + \beta_1 KSDM + \beta_2 SAKD + \beta_3 PIA + \beta_4 SAP + e$$

Keterangan:

KLK	= Kualitas Laporan Keuangan
KSDM	= Kompetensi Sumber Daya Manusia
SAKD	= Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
PIA	= Peran Internal Audit

SAP	= Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
α	= Nilai intersep (konstan)
β	= Koefisien
e	= Error (tingkat kesalahan)

4. Pengujian Hipotesis

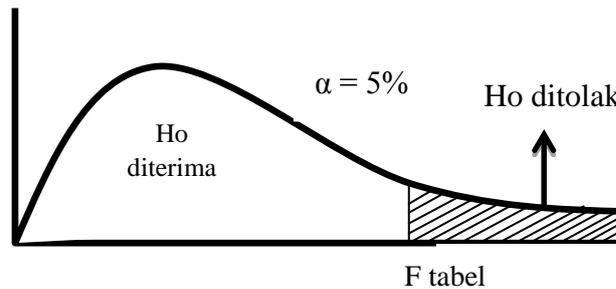
a) Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016) koefisien determinasi R^2 untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah antara nol sampai 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

b) Uji F (*Goodness of Fit*)

Menurut Ghozali (2016) uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*Goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen yang mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak (Ghozali, 2016:98). Menentukan F tabel dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% dengan derajat kebebasan pembilang (df)=k dan derajat kebebasan penyebut (df)=n-k-1 dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan dengan kriteria:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya model yang digunakan bagus (*fit*).
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima atau H_a tidak diterima, artinya model yang digunakan tidak bagus (tidak *fit*).



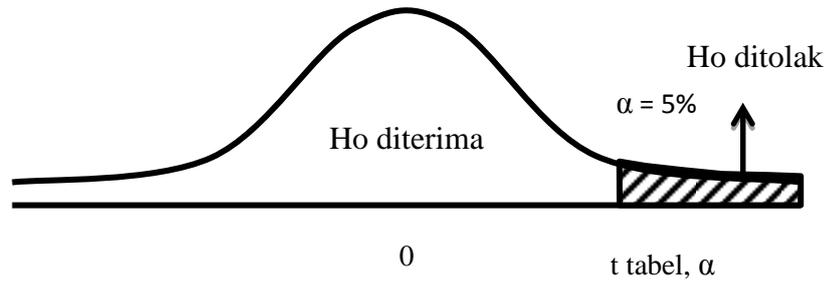
Gambar 3.1

Penerimaan Hipotesis Uji F

c) Uji t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel penjelas atau independen dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:98). *Level of significant* pada tarif $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan dinyatakan dalam $df=n-1$ yang merupakan uji satu sisi (*one tailed test*). Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan dengan kriteria:

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima atau H_a tidak diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Penerimaan Hipotesis Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, peran internal audit dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan obyek penelitian pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Temanggung. Berdasarkan perhitungan responden Liker Estimation sebanyak 204 responden yang merupakan pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan di masing-masing instansi pada Organisasi Perangkat Daerah seperti kasubag perencanaan dan keuangan, bendahara, staf akuntansi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, peran internal audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah . Hal ini berarti semakin pemerintah daerah menerapkan sistem akuntansi pemerintah daerah dan standar akuntansi pemerintah maka laporan keuangan pemerintah daerah juga akan semakin berkualitas.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya dilakukan dengan obyek penelitian pada pegawai di OPD di Kabupaten Temanggung
2. Penelitian ini terbatas hanya menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, peran internal audit, dan penerapan standar akuntansi pemerintah.

C. Saran

Memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan maka saran yang disampaikan antara lain:

1. Penelitian selanjutnya objek diperluas, tidak sebatas Kabupaten Temanggung, misal OPD se Karesidenan Kedu.
2. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti komitmen organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, Rifka. (2015). Pengaruh Peran Auditor Internal, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penyelesaian dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang Baik. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Agus, K., Wibawa, S., Sinarwati, N. K., Yuniarta, G. A., & Ganesha, U. P. (2017). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Universitas Pendidikan Ganesha *e-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, 1*.
- Andini, D., & Yusrawati. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi 1, 24*, 65–82.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory. *An Assesmet and Review. Academy of Management Review, 14*, 57–74.
- Evicahyani, Sagung Inten. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ihsanti, Emilda.,(2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *Journal of Financial Economic*
- IHPS BPK RI Semester 1 Tahun 2017*.
- Jensen, M. C. an W. H. M. (1976). Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic, 3(4)*, 305–360.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugraheta, U.R. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan StandarAkuntansi Pemerintah terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Financial Economic*

Nurrilah, As Syifa dan Muid, Dul (2014) Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (*Studi Empiris pada SKPD Kota Depok*). Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang “Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia”

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang “Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah”

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang “Inspektorat Pengawas Internal Pemerintah Daerah”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 2 tentang “Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang “Standar Akuntansi Pemerintahan”

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang “ Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”

Pramudityo, Bagus. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Journal SI Ak Universitas Muhammadiyah Surakarta Jurusan Akuntansi Program SI* .

Putra, Dewa K A D S A., Herawati, Nyoman Trisna., dan Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, 8.

Rini, Putri.N.F. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Journal SI Ak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

Sugiyono. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

The Institute of Internal Auditor. 1999. *Standards for The Profesional Practice of*

Internal Auditing.

- Tjiptoherijanto, P. (2001). Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Peran Serikat Pekerja dalam Peningkatan Kesejahteraan. *Majalah Perencanaan Pembangunan Edisi 23*.
- Xu, Hongjiang, Jeretta H.N., g. Darly Nord, B. L. (2003). Key issue of accounting information quality management: Australian case studies. *Industrial Management & Data System, 103*(7), 461–470.
- Yenny. (2013). Prinsip-prinsip Good Governance Studi tentang Penerapan Prinsip- prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Publik di Knator Camat Samarinda Utara Kota Samarinda. *E-Journal Ilmu Adminsitrasi Negara, 1*(2).
- Yuliani, S. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi, 3*(2), 206–220.
- Zeyn. (2011). Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Rieview Akuntansi Dan Keuangan, 1*(1), 21–37.

